

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Hasil Penelitian**

##### **4.1.1. Gambaran Umum Perusahaan**

###### **1. Sejarah BPKP RI**

Sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang perkembangan lembaga pengawasan sejak sebelum era kemerdekaan. Dengan besluit Nomor 44 tanggal 31 Oktober 1936 secara eksplisit ditetapkan bahwa Djawatan Akuntan Negara (Regering Accountantsdienst) bertugas melakukan penelitian terhadap pembukuan dari berbagai perusahaan negara dan jawatan tertentu. Dengan demikian, dapat dikatakan aparat pengawasan pertama di Indonesia adalah Djawatan Akuntan Negara (DAN). Secara struktural DAN yang bertugas mengawasi pengelolaan perusahaan negara berada di bawah Thesauri Jenderal pada Kementerian Keuangan. Dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1961 tentang Instruksi bagi Kepala Djawatan Akuntan Negara (DAN), kedudukan DAN dilepas dari Thesauri Jenderal dan ditingkatkan kedudukannya langsung di bawah Menteri Keuangan. DAN merupakan alat pemerintah yang bertugas melakukan semua pekerjaan akuntan bagi pemerintah atas semua departemen, jawatan, dan instansi di bawah kekuasaannya. Sementara itu fungsi pengawasan anggaran dilaksanakan oleh Thesauri Jenderal. Selanjutnya dengan Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966 dibentuklah Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN) pada Departemen Keuangan. Tugas DDPKN (dikenal kemudian sebagai DJPKN) meliputi pengawasan anggaran dan pengawasan badan usaha/jawatan, yang semula menjadi tugas DAN dan Thesauri Jenderal. DJPKN mempunyai tugas melaksanakan pengawasan seluruh pelaksanaan anggaran negara, anggaran daerah, dan badan usaha milik negara/daerah. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1971 ini, khusus pada Departemen Keuangan, tugas Inspektorat Jendral dalam bidang pengawasan keuangan negara dilakukan oleh DJPKN.

## **2. Visi dan Misi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)**

- a. Visi Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional.
- b. Misi Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP)
  - Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional guna mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif.
  - Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang efektif, dan
  - Mengembangkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten.

MOTTO BPKP "Kawal Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan".

## **3. Nilai-Nilai BPKP (PIONIR)**

- Profesional
- Integritas
- Orientasi Pengguna
- Nurani dan Akal Sehat
- Independen
- Responsibel

## **4. Tujuan Strategik**

Tujuan strategik memuat secara jelas arah mana yang akan dituju atau diinginkan organisasi, yang merupakan penjabaran lebih lanjut atas misi yang telah ditetapkan. Dengan ditetapkannya tujuan strategik, maka dapat diketahui secara jelas apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk periode 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Lebih lanjut pencapaian tujuan merupakan ukuran keberhasilan sampai sejauh mana visi-misi organisasi telah dicapai. Tujuan strategik yang telah ditetapkan oleh Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah adalah :

- a. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Daerah yang Bersih dan Efektif.
- b. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- c. Peningkatan Kapabilitas PengawasanIntern Pemerintah Daerah yang Profesional dan Kompeten.

## **5. Fungsi**

Sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPKP menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;
2. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/ daerah;
3. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;

4. Pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis;
5. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;
6. Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya;
7. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat;
8. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
9. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan;
10. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan fungsional auditor;
11. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah;
12. Pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
13. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP;  
dan

14. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

## **6. Jobdesc Internal Audit**

Audit dilaksanakan berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

### **I. Perencanaan**

- 1) Pemahaman obyek audit dan identifikasi masalah.
- 2) Pemahaman sistem pengendalian intern.
- 3) Penentuan tujuan dan lingkup audit; 4) Penentuan kriteria audit.
- 5) Pengidentifikasian jenis bukti dan prosedur audit.
- 6) Penyusunan program audit.

### **II. Pelaksanaan**

- 1) Perolehan dan Pengujian data.
- 2) Penyusunan dan penyampaian konsep Temuan Audit.
- 3) Perolehan tanggapan resmi dan tertulis atas konsep Temuan Audit.
- 4) Penyampaian Temuan Audit.

### **III. Komunikasi Hasil Audit**

- 1) Penyusunan konsep laporan hasil audit.
- 2) Penyusunan dan penyampaian Laporan Hasil Audit (LHA).

## **7. Mekanisme Kerja**

Program kerja audit berisi tujuan audit dan prosedur yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan audit. Input yang diperlukan dalam kegiatan Penyusunan Program Kerja Audit terinci antara lain berupa Survei Pendahuluan, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI), Pedoman Pelaksanaan Pengawasan (SOP), dan Arahan khusus dari pimpinan APIP terkait audit terinci. Di dalam program audit tersebut dituangkan hal-hal sebagai berikut:

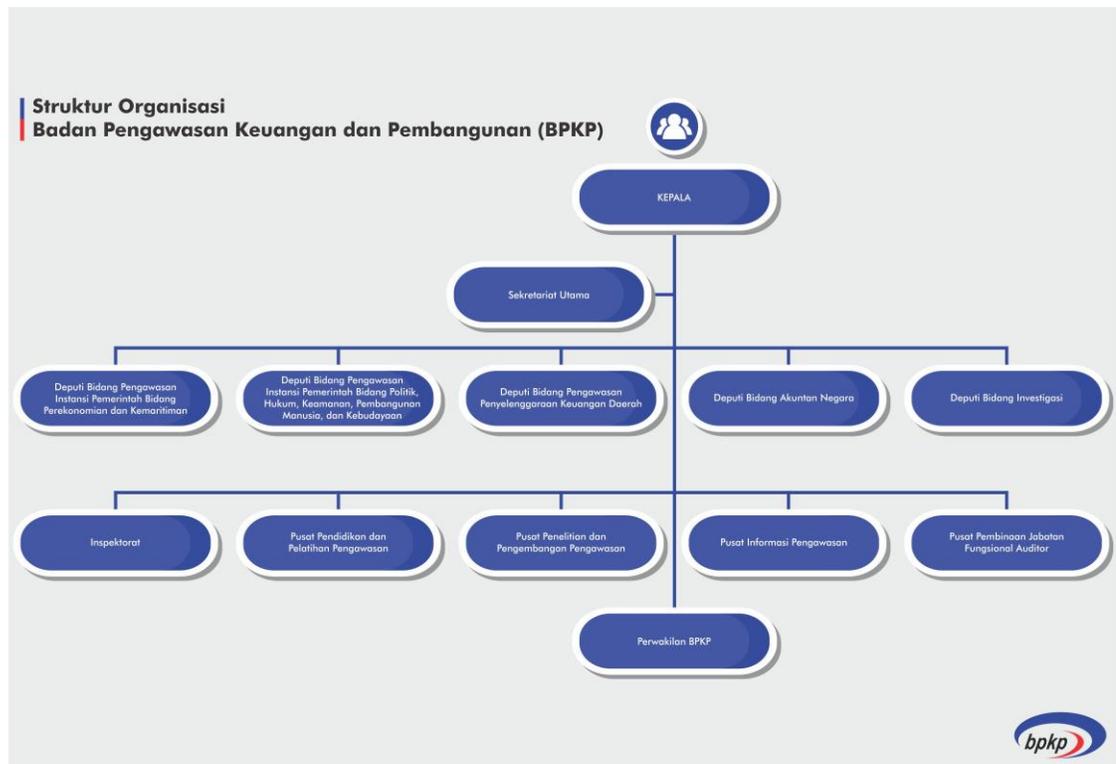
1. Dasar Audit APIP memasukkan ketentuan perundang-undangan yang menjadi mandat bagi APIP dalam melaksanakan audit.

2. Standar Audit Diisi dengan standar audit yang akan digunakan dalam melaksanakan audit. Standar yang digunakan yaitu Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintahan Indonesia (AAIPI).
3. Organisasi/Program/Fungsi Pelayanan Publik yang Diaudit Diisi dengan auditan yang akan diaudit, pengertian auditan di sini dapat berupa organisasi/program/fungsi pelayanan publik yang kinerjanya akan diaudit.
4. Tahun Anggaran yang Diaudit Bagian dari penjabaran lingkup audit yang akan memasukkan periode/tahun anggaran yang akan diaudit. Secara umum, periode yang dipilih adalah hanya untuk satu periode tahun anggaran. Namun demikian, dimungkinkan juga untuk pelaksanaan audit atas periode yang lebih dari satu tahun jika pada audit atas keseluruhan pelaksanaan program yang memakan waktu lebih dari 1 tahun.
5. Identitas dan Data Umum yang diaudit Data umum dari organisasi/program/fungsi pelayanan publik yang akan diaudit yang didapat selama proses pemahaman atas auditan.
6. Alasan Audit Diisi dengan alasan audit yang bisa berasal dari hasil analisis perolehan data dan informasi awal yang akan diaudit.
7. Jenis Audit Diisi dengan Audit Kinerja
8. Tujuan Audit Tujuan audit merupakan tujuan umum yang didapat atau ditentukan selama pelaksanaan proses Penentuan Tujuan dan Lingkup Audit.
9. Sasaran Audit Tujuan audit secara rinci yang menjabarkan apa yang telah ditentukan dalam tujuan audit umum.
10. Metodologi Audit Diisi dengan metodologi atau cara serta pendekatan audit yang akan ditempuh dalam menjalankan penugasan audit kinerja.
11. Kriteria Audit Diisi dengan kriteria audit yang akan dipakai dalam audit.
12. Jenis dan Sumber Bukti serta Prosedur Audit Diisi dengan jenis dan sumber bukti yang dibutuhkan untuk menjawab tujuan audit. Prosedur audit yang dibuat bertujuan memberikan petunjuk kepada para APIP berkaitan bukti-bukti audit yang dibutuhkan. Langkah atau prosedur audit sebaiknya dibuat menurut sasaran

audit yang telah ditetapkan agar nantinya secara keseluruhan hasil audit dapat menjawab atau mencapai tujuan audit.

## 8. Struktur Organisasi

**Gambar 4.1 Struktur Organisasi**



Sumber : BPKP RI

### 4.1.2. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah karyawan internal audit pada kantor BPKP Republik Indonesia. Pengambilan data kuisioner diambil dari 10 responden teratas. Data mengenai karakteristik responden adalah sebagai berikut:

#### 1. Responden berdasarkan jenis kelamin

**Tabel 4.1 Data responden berdasarkan jenis kelamin**

<b>Jenis</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
<b>Kelamin</b>		
Laki-laki	6	60%
Perempuan	4	40%
Total	10	100%

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa frekuensi responden laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan frekuensi responden perempuan. Frekuensi responden laki-laki sebanyak 6 responden dan frekuensi responden perempuan sebanyak 4 responden.

## 2. Berdasarkan Usia

**Tabel 4.2 Data responden berdasarkan usia**

<b>Usia Responden</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
20 – 25	0	0
26 - 35	4	40%
36 - 45	2	20%
> 45	4	40%
Total	10	100%

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa frekuensi responden dalam penelitian ini berusia >45 tahun dan 26-35 tahun adalah sama yaitu 4 responden dan frekuensi responden berusia 36-45 tahun adalah 2, serta responden dengan rentan umur 20-25 adalah 0.

## 3. Berdasarkan tingkat pendidikan responden

**Tabel 4.3 berdasarkan pendidikan responden**

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Diploma	3	30%
S1	5	50%
S2	2	20%
S3	0	0
Total	10	100%

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa responden yang berpendidikan S1 menunjukkan frekuensi dengan jumlah 6 responden dan responden yang berpendidikan lebih dari S3 hanya 2 responden.

#### 4. Berdasarkan Jabatan/posisi

**Tabel 4.4 berdasarkan jabatan/posisi**

Jabatan/posisi	Frekuensi	Persentase
PFA	1	10%
Auditor	2	20%
Auditor Pertama	1	10%
Auditor Madya	2	20%
Auditor Pelaksana Lanjutan	1	10%
Auditor Muda	1	10%
Auditor Penyelia	1	10%
Total	9	90%

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa frekuensi responden sebagai karyawan Auditor dan Auditor Madya yaitu 2. jawaban dari Responden terkait selebihnya yaitu dengan frekuensi 1.

#### 4.1.3. Tanggapan Responden Berhubungan Dengan Efektivitas Peran Internal Audit

Berikut ini akan dijabarkan hasil analisis data responden berdasarkan data keseluruhan yang berhubungan dengan efektivitas internal audit.

**Tabel 4.5. Tanggapan responden data keseluruhan**

Responden	Nomer item/skor hasil kuisioner																	Σ	%	kategori
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
RS 1	5	5	4	5	4	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	76	89,41	Sangat Baik
RS 2	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	0	4	56	65,88	Baik
RS 3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	68	80,00	Baik
RS 4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	4	4	4	4	5	79	92,94	Sangat Baik
RS 5	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	73	85,88	Sangat Baik
RS 6	5	5	4	4	4	5	5	4	4	5	4	5	4	5	4	0	5	72	84,71	Sangat Baik
RS 7	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	81	95,29	Sangat Baik
RS 8	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	5	5	4	4	5	70	82,35	Sangat Baik
RS 9	4	3	3	4	5	5	5	3	4	5	4	5	4	4	4	3	5	70	82,35	Sangat Baik
RS 10	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	65	76,47	Baik
<b>Jumlah</b>	<b>45</b>	<b>38</b>	<b>41</b>	<b>43</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>46</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>44</b>	<b>38</b>	<b>44</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>42</b>	<b>31</b>	<b>46</b>	<b>710</b>	<b>835,29</b>	<b>-</b>
<b>Rata-rata</b>																		<b>71</b>	<b>83,529</b>	<b>Sangat Baik</b>

Sumber : Data diolah (2022)

Keterangan :

STS : Sangat Tidak Setuju

- TS : Tidak Setuju  
 N : Netral  
 S : Setuju  
 SS : Sangat Setuju

**Tabel 4.6. Persentase kategori**

No	% jumlah skor	Kriteria
1	6.24 - 24.99	Tidak Baik
2	25 - 43.72	Kurang baik
3	43.73 - 63.48	Cukup
4	62.49 - 81.24	Baik
5	81.25 – 100	Sangat Baik

Sumber : Rahman (2018:70)

Pada tabel 4.14 dapat dilihat bahwa data keseluruhan yang berhubungan dengan efektivitas peran internal audit pada kantor BPKP Republik Indonesia. Jumlah skor 710 tanggapan responden dengan rata-rata 71 dan rata-rata keseluruhan pertanyaan 1-17 adalah 83,52%.

Pada pertanyaan nomer 2, Responden 7 memilih sangat tidak setuju dengan persentase 0,14% dengan pertanyaan “Temuan diungkapkan dengan benar dan dibenarkan”. Responden 8 pada pertanyaan 11 memilih sangat tidak setuju dengan persentase 0,14% dan Responden pada pertanyaan 16 sebesar 80,6% responden memberikan tanggapan sangat setuju dan setuju bahwa Sebagian besar auditor internal memiliki latar belakang pendidikan S-1, 2 responden yaitu responden 2 dan responden 6 dengan persentase 0,28% memilih jawaban lain-lain yang mana menyatakan tidak tahu dan menyatakan sebagian besar anggota tim adalah D3. Hal ini dikarenakan para responden menganggap keahlian internal audit pada kantor BPKP Republik Indonesia bukan semata dipengaruhi oleh latar pendidikan tetapi lebih dipengaruhi oleh pengalaman yang dimilikinya . Selebihnya responden memilih menyatakan netral, setuju, dan sangat setuju.

Rata-rata keseluruhan responden terkait efektivitas peran internal audit 83,52% tanggapan setuju dan sangat setuju yang berarti sangat baik dan peran internal audit sangat efektif. hal ini berarti selaras pada tabel persentase kategori pada tabel 4.15 bahwa rata-rata data keseluruhan efektivitas internal audit adalah sangat baik yang

berarti kesimpulan data keseluruhan bahwa internal audit sangat efektif dalam menjalankan tugasnya.

#### 4.1.4. Tanggapan Responden Berhubungan Dengan Pendeteksian *Fraud*

Berikut ini adalah penjabaran nilai/skor data keseluruhan pendeteksian *fraud* dari data responden yang sudah terkumpul.

**Tabel 4.7. Tanggapan responden data keseluruhan pendeteksian *fraud***

Responden	Nomer item/skor hasil kuisioner													Jumlah	%	kategori
	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
RS 1	4	4	4	4	4	5	3	5	3	5	3	4	4	52	80,00	Baik
RS 2	0	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	3	40	61,54	Cukup
RS 3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52	80,00	Baik
RS 4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	65	100,00	Sangat Baik
RS 5	5	4	5	4	4	5	5	4	4	5	5	4	5	59	90,77	Sangat Baik
RS 6	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	4	5	56	86,15	Sangat Baik
RS 7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	65	100,00	Sangat Baik
RS 8	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	3	59	90,77	Sangat Baik
RS 9	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	64	98,46	Sangat Baik
RS 10	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	3	4	53	81,54	Sangat Baik
<b>jumlah</b>	40	43	43	41	44	48	44	44	42	47	44	42	43	565	869,231	0
Rata-rata														56,5	86,92	Sangat Baik

Sumber : Data diolah (2022)

Keterangan :

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

N : Netral

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

**Tabel 4.8. Persentase kategori**

No	% jumlah skor	Kriteria
1	6.24 - 24.99	Tidak Baik
2	25 - 43.72	Kurang baik
3	43.73 - 63.48	Cukup

4	62.49 - 81.24	Baik
5	81.25 – 100	Sangat Baik

Sumber : Rahman (2018:70)

Pada tabel 4.7 dapat dilihat bahwa data keseluruhan yang berhubungan dengan pendeteksian *fraud* pada kantor BPKP Republik Indonesia. Jumlah skor 565 tanggapan responden dengan rata-rata 56,5 dan rata-rata keseluruhan pertanyaan 18-30 adalah 86,92% .

Dapat dilihat bahwa pertanyaan 18 sebesar 100% responden memberikan tanggapan sangat setuju dan setuju bahwa internal audit memiliki pengetahuan yang cukup memadai tentang jenis-jenis kecurangan, terutama yang sering terjadi pada saat penugasan auditee dan responden 2 memberikan jawaban lain-lain yaitu tidak tahu yang nilai persentasenya adalah 0,17%. Selebihnya responden mengatakan netral, setuju, dan sangat setuju. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju dan sangat setuju secara keseluruhan internal audit dalam pendeteksian *fraud* sangat efektif terbukti dengan sebagian besar responden menyatakan setuju dan sangat setuju

hal ini berarti selaras pada tabel persentase kategori pada tabel 4.7 bahwa rata-rata data keseluruhan efektivitas internal audit adalah sangat baik yang berarti kesimpulan data keseluruhan bahwa internal audit sangat efektif dalam pendeteksian *fraud*.

#### 4.1.5. Pembahasan

1. Pengelompokkan data responden berdasarkan rentang skor, diperoleh rata-rata keseluruhan dari kuisioner efektivitas peran internal audit 86,92%. Hal ini masuk pada kategori sangat baik dan sangat efektif yang artinya sebagian besar responden menyatakan setuju dan sangat setuju. Responden juga memberikan tanggapan tidak setuju dalam pengelompokkan data berdasarkan nilai/skor, meskipun tanggapan tersebut hanya sebesar 0,2%. Sedangkan data responden diperoleh dari 0,14% responden yang memberikan tanggapan sangat tidak setuju. Responden 2 dan responden 6 memilih jawaban lain lain yang mana menyatakan tidak tahu dan menyatakan sebagian besar anggota tim adalah D3. Hal ini dikarenakan para responden menganggap keahlian internal audit pada kantor

BPKP Republik Indonesia bukan semata dipengaruhi oleh latar pendidikan tetapi lebih dipengaruhi oleh pengalaman yang dimilikinya.

Keseluruhan hasil penelitian diatas dapat diartikan bahwa efektivitas audit internal pada BPKP RI yang dilakukan oleh internal audit sudah berjalan dengan sangat efektif karena dari hasil penelitian efektivitas peran internal audit melalui pengukuran di tiap indikator memperoleh hasil yang masuk pada kategori sangat baik dan sangat efektif internal audit dalam menjalankan tugasnya pada Lembaga pemerintahan BPKP Republik Indonesia. Hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Paramitha (2016) yang menyatakan bahwa efektivitas dinilai atau diukur menggunakan indikator efektivitas audit internal. Dengan indikator tersebut dapat diketahui sejauh mana dampak atau pengaruh kinerja audit internal dalam ruang lingkup audit. Dan juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wayan dan Ketut (2012) yang menyebutkan bahwa efektivitas audit internal diukur menggunakan standar profesi audit internal dan hasil yang diperoleh adalah audit internal berjalan dengan efektif.

2. Pembahasan mengenai pendeteksian *fraud* dengan mengelompokkan data dari pertanyaan yang sudah diberikan dalam bentuk kuisisioner, diperoleh sebanyak 86,92% responden menyatakan setuju dan sangat setuju, sedangkan responden 2 pada pertanyaan 18 memilih jawaban lain-lain yaitu tidak tahu oleh responden persentasenya adalah 0,17%, meskipun begitu jumlah terbanyak rata-rata yang diperoleh untuk tingkat efektif dalam pendeteksian *fraud* diangka 85% keatas hal ini selaras dengan tabel persentase kategori yang artinya pendteksian *fraud* ada pada kategori sangat baik dan sangat efektif.

Jadi, dapat disimpulkan hasil dari pendeteksian *fraud* sangat efektif pada kantor BPKP Republik Indonesia.